

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER
TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT 2014 – 2019
(PENDEKATAN PERSAMAAN *RECURSIVE*)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



ABD. MUDI

NIM. B1013161007

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER
TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT 2014 – 2019
(PENDEKATAN PERSAMAAN *RECURSIVE*)**

SKRIPSI OLEH:

ABD. MUDI

NIM. B1013161007

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Abd. Mudi
NIM : B1013161007
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Publik
Judul proposal Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2014 – 2019 (Pendekatan Persamaan *Recursive*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 30 Mei 2023



Abd. Mudi

NIM : B1013161007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 766840, Surel feb@untan.ac.id, Laman <https://feb.untan.ac.id/>

Pontianak, 27 Mei 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor. 505/05.23/Plagiasi.EP

Menjelaskan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Abd. Mudi
NIM : B1013161007
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap
Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2014 - 2019
(Pendekatan Persamaan *Recursive*)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Setelah dilakukan pemeriksaan, naskah tugas akhir mahasiswa tersebut dinyatakan telah MEMENUHI syarat ketentuan pemeriksaan plagiasi.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Pemeriksa Plagiasi
Prodi Ekonomi Pembangunan

(**Fara Dina, S.E., M.E**)
NIP. 198607302019032010

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abd. Mudi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer
Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Barat 2014 – 2019 (Pendekatan Persamaan
Recursive)

Tanggal Ujian : 23 Juni 2021

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya Saya sendiri,
dan bertanggungjawab atas apa yang telah saya tulis.

Pontianak, 30 Mei 2021



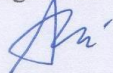
Abdul Mudi

NIM: B1013161007

LEMBAR YURIDIS

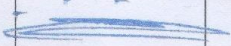
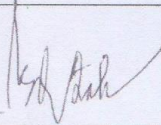
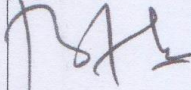
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER
TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
2014 – 2019 (PENDEKATAN PERSAMAAN *RECURSIVE*)

Penanggung Jawab Yuridis


Abd. Mudi
B1013161007

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : (23/Juni/2021)

Majelis Penguji

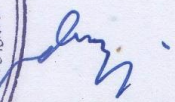
No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing TA	Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., MA	17/05/2023	
		NIP. 196707071992021001		
2	Ketua Penguji	Dr. Rosyadi, S.E., M.Si.	24/11/2022	
		NIP. 196509211993031001		
3	Anggota Penguji	Dr. Restiatun, S.E., M.Si.	16/05/2023	
		NIP. 197505212002122001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)



23 JUN 2023

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan


Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 196912011994032004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penulis haturkan berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2014 – 2019 (Pendekatan Persamaan *Recursive*)”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura Pontianak dan merupakan wujud dari ilmu-ilmu yang diperoleh selama ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Dr. Jumhur, S.E, M.Si selaku Ketua PPAPK Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Bapak Prof Dr. H. Eddy Suratman, S.E., MA selaku Dosen Pembimbing

Utama dan dosen pembimbing akademik yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan nasehat serta bimbingan mulai dari awal rencana penelitian ini di cetuskan hingga akhir penulisan skripsi ini baik berupa ide, saran, maupun kritik.

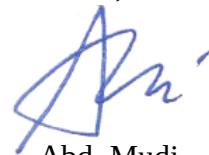
7. Bapak Dr. Rosyadi, S.E., M.Si selaku penguji pertama yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan petunjuk, bimbingan, dan bantuan hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si selaku penguji kedua yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan petunjuk, bimbingan, dan bantuan hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak/Ibu staf Administrasi Akademik dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Jumali dan Ibu Sama serta kakak saya Subaidah yang selalu berjuang memberikan kekuatan, semangat, dorongan, serta perhatian dan kasih sayang dalam memotivasi penulis, dan juga untuk keluargaku yang selama ini memotivasi dan bantuan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Soleha, S.Ag yang selalu support dan memberikan semangat setiap harinya terima kasih telah hadir dalam hidup dan banyak memberikan hal-hal yang baru dalam hidup
13. Kepada sahabatku Verdi, Ali, Mael, Destiar, Hendy, Izal, Andri, Indra dan Tugiono terima kasih telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal, telah memberikan dukungan serta menjadi tempat untuk penulis bertukar pikiran selama masa perkuliahan. Terimakasih sudah menjadi sahabatku.
14. Kepada sahabatku di UKM BK. Satria yang selalu membantu penulis disetiap kondisi , Adi, Nana, Windi, Cici, Faisal dan Elip yang selalu mendorong dan

memberikan bantuan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi. Serta terimakasih kepada seluruh teman di UKM BK yang lain.

15. Teman seperjuangan IESP angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan nya kepada penulis.
16. Teman-teman, senior maupun junior Himpunan Mahasiswa Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (HIMAPPAPK) yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan menjadi tempat rumah pertama di kampus yang sungguh berharga selama masa perkuliahan.
17. CV. Kreasi Brainwash Ideografi Barokah Sejahtera terima kasih telah terbentuk dari masa-masa perkuliahan dan membantu penulis dalam segala hal.
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Pontianak, 30 Mei 2021

Penulis,



Abd. Mudi
B1013161026

THE EFFECT OF LOCAL ORIGIN INCOME AND TRANSFER OF FUNDS ON POVERTY IN DISTRICTS/CITIES OF WEST KALIMANTAN PROVINCE 2014– 2019 (RECURSIVE EQUATION APPROACH)

By : Abd. Mudi

**Economics and Business Faculty
Tanjungpura University**

ABSTRACT

This research was conducted to see or describe the effect of regional original income and transfer funds on poverty in the districts/cities of West Kalimantan province. This study also discusses the effect of regional original income on regional expenditure in responding to poverty in West Kalimantan province, the influence of general allocation funds on regional expenditure in addressing poverty in West Kalimantan province, the influence of special allocation funds on regional expenditure in addressing poverty. In West Kalimantan Province, The Effect of RevenueSharing Funds on Regional Expenditures in Responding to Poverty in West Kalimantan Province. This research uses quantitative research and the data used to achieve the objectives in this research is entirely through secondary data. The data obtained are data from related literature in the form of documents, articles, notes, and archives.

Keywords: *Income Influence, Transfer Funds*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER
TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
2014– 2019 (PENDEKATAN PERSAMAAN *RECURSIVE*)**

Abd. Mudi

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat atau mendeskripsikan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Didalam penelitian ini juga membahas tentang, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dalam Menyikapi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat, Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah dalam menyikapi kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dalam Menyikapi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat, Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Dalam Menyikapi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip.

Kata Kunci: *Pengaruh Pendapatan, Dana Transfer*

LEMBAR RINGKASAN MATERI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2014 – 2019 (PENDEKATAN PERSAMAAN *RECURSIVE*)

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Angka kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase angka kemiskinan di Indonesia pada periode September 2019 hingga maret 2020 mencapai 9,78 % atau sebesar 26,42 juta jiwa.

Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan dan upaya untuk menurunkannya masih terus dilakukan. Permasalahan kemiskinan, terjadi di setiap daerah di Indonesia, termasuk di 14 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Kalimantan (Syahroni, 2018). Berdasarkan data BPS (2017), pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat masih menempati posisi tertinggi di Pulau Kalimantan yaitu sebanyak 388,81 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,86 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat sebanyak Rp269,73 ribu orang atau 7,37%. Angka ini menurun 17,335 ribu orang dibandingkan dengan kondisi maret 2018 yang sebesar 387,08 ribu orang atau 7,77%.

Kalimantan Barat sebagai suatu wilayah yang dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah pusat juga akan memberikan

bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya melalui dana perimbangan.

B. Pernyataan Masalah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada setiap tahunnya seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi fakta yang terjadi adalah kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih fluktuatif yang artinya kemiskinan terkadang meningkat dan terkadang menurun. Hal tersebut dibuktikan oleh data kemiskinan yang dirilis oleh BPS kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer akan mempengaruhi penurunan kemiskinan melalui belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisa perkembangan PAD dan Dana Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Menganalisa pengaruh PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Menganalisa pengaruh Dana Transfer terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

D. Metode Penelitian

Berdasarkan pengukuran dan analisis data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data berupa data sekunder sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, dari tahun 2014 - 2019. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil dan kemiskinan sebagai variabel terikatnya dan belanja daerah sebagai variabel penghubung. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yaitu data mengenai variabel yang diperoleh dari dokumen-dokumen, website, jurnal-jurnal, artikel dan tulisan ilmiah. Sedangkan analisis data terdiri dari Statistik Deskriptif ; Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas; Uji hipotesis meliputi Uji Parsial (uji t) dan Uji Determinasi (R^2) dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

E. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian dijlkaskan dalam pembahasan tersebut

1. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja daerah. Dengan kata lain bahwa tinggi rendahnya tingkat Pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat, maka tidak akan mempengaruhi belanja daerah.
2. pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah dalam menyikapi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. pada penelitian ini, hipotesis kedua diterima sehingga Dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
3. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah, dikarenakan Dana Alokasi Khusus pemerintah hanya menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan, prasarana pembangunan dan kegiatan yang membangun pertumbuhan ekonomi.
4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang mana Dana Bagi Hasil hanya digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan daerah

F. Kesimpulan

Dari hasil penilitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi tingkat Pendapatan yang dihasilkan

oleh suatu daerah yang dilakukan oleh provinsi, maka tidak akan mempengaruhi Belanja Daerah.

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dengan demikian diharapkan digunakan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dimana dana ini digunakan sebagai dana untuk kegiatan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta perbaikan ekonomi daerah sehingga dapat membantu pemda dalam pengalokasian Belanja Daerah.
4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Yang artinya Dana Bagi Hasil tidak dapat dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan dalam mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
PERTANGGUNGJAWABAN.....	ix
LEMBAR YURIDIS.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Pernyataan Masalah.....	5
1.2.2 Pertanyaan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegiatan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.2 Teori Transfer.....	7
2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	8
2.1.4 Dana Alokasi Khusus.....	8
2.1.5 Dana Bagi Hasil.....	10
2.1.6 Kemiskinan.....	10
2.1.7 Belanja Daerah.....	11
2.1.8 Desentralisasi Fiskal.....	12
2.1.9 Otonomi Daerah.....	12
2.2 Kajian Empiris.....	13
2.2.1 Ringkasan Hasil Penelitian terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran.....	15
2.4 Hipotesis.....	16

BAB III. METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Bentuk Penelitian dan Definisi Operasional	17
3.1.1 Variabel Dependen.....	17
3.1.1 Variabel Dependen.....	17
3.2 Definisi Operasional.....	17
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	18
3.4 Metode pengumpulan data	18
3.5 Tempat dan Waktu penelitian.....	19
3.6 Teknik Analisis Data	19
3.6.1 Analisis Deskriptif	19
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	19
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	19
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	20
3.6.2.3 Uji Auto Korelasi	21
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	22
3.6.3 Pengujian Regresi.....	23
3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	23
3.7 Pengujian Hipotesis.....	24
3.7.1 Uji Koefisien Determinasi.....	24
3.7.2 Uji Statistik (Uji Statistik F	24
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	28
4.1.2 Uji Asumsi Klasik	28
4.1.2.1 Uji Normalitas	28
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas	28
4.1.2.3 Uji Autokorelasi	29
4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	30
4.1.4 Uji Hipotesis.....	32
4.1.4.1 Uji Simultan (Uji F)	32
4.1.4.2 Uji Parsial (Uji T).....	33
4.1.4.3 Uji Deteminasi (R^2).....	35
4.2 Pembahasan	35
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat	33
4.2.2 Pengaruh Dana Alokaksi Umum Terhadap Belanja Daerah	

Dalam Menyikapi Kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat	34
4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dalam Menyikapi Kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat	34
4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Dalam Menyikapi Kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat	35
BAB V. PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	38
Daftar Pustaka	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan dan Tidaknya Autokorelasi	22
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif	26
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	27
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	28
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Uji Glejser	28
Tabel 4.4 Hasil Uji Refresi Berganda	29
Tabel 4.5 Hasil Uji F	31
Tabel 4.6 Hasil Analisis Uji Parsial	31
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	33

DAFTAR GAMBAR

2.3 Kerangka Konseptual.....	15
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Uji Spss.....	47
Lampiran 2 : Data Olah	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan isu penting dan perlu perhatian khusus dalam mengatasinya. Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Angka kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase angka kemiskinan di Indonesia pada periode September 2019 hingga maret 2020 mencapai 9,78 % atau sebesar 26,42 juta jiwa.

Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan dan upaya untuk menurunkannya masih terus dilakukan. Permasalahan kemiskinan, terjadi di setiap daerah di Indonesia, termasuk di 14 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Kalimantan (Syahroni, 2018). Berdasarkan data BPS (2017), pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat masih menempati posisi tertinggi di Pulau Kalimantan yaitu sebanyak 388,81 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,86 persen. Sementara Kalimantan Timur sebanyak 218,67 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,08 persen, Kalimantan Selatan sebanyak 194,56 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,70 persen, Kalimantan Utara sebanyak 48.56 ribu jiwa dengan persentase sebesar 6.96 persen dan Kalimantan Tengah sebanyak 137,88 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,26 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat sebanyak Rp269,73 ribu orang atau 7,37%. Angka ini menurun 17,335 ribu orang dibandingkan dengan kondisi maret 2018 yang sebesar 387,08 ribu orang atau 7,77%.

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi

Kalimantan Barat (ribu Jiwa) 2014 - 2019

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	9,46	9,42	8,54	8,59	8,55	8,19
Bengkayang	7,20	6,94	7,46	7,51	7,17	6,96
Landak	13,71	13,51	12,32	12,23	11,77	11,47
Mempawah	6,00	5,52	5,75	5,94	5,61	5,32
Sanggau	4,47	4,57	4,51	4,52	4,67	4,57
Ketapang	11,60	11,72	10,99	11,02	10,93	10,54
Sintang	9,11	9,33	10,07	10,20	10,35	9,65
Kapuas Hulu	10,03	9,66	9,82	9,45	9,60	9,62
Sekadau	6,31	6,50	6,14	6,46	6,17	6,11
Melawi	12,40	12,57	12,63	12,54	12,83	12,38
Kayong Utara	9,55	9,84	10,19	9,89	10,08	9,98
Kubu Raya	5,45	5,22	5,04	5,26	5,07	4,74
Pontianak	5,15	5,22	5,55	5,31	5,00	4,88
Singkawang	5,88	5,76	5,33	5,42	5,12	4,91
Kalimantan Barat	8,54	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Barat tidak terjadi secara linier berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan angka 8,03 % ke 7,87 %. Namun pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan angka 7,88 % pada tahun 2019 terjadi penurunan pada angka hingga titik 7,49 %. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hanya terjadi pada periode yang pendek. Kondisi demikian menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kalimantan Barat masih memiliki potensi kembali mengalami peningkatan.

Adanya otonomi daerah melahirkan berbagai bentuk desentralisasi yang salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Munculnya desentralisasi fiskal menuntut setiap wilayah daerah termasuk Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Kalimantan Barat sebagai suatu wilayah yang dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya melalui dana perimbangan. Keberadaan PAD dan dana perimbangan dalam suatu daerah harus mampu diolah secara tepat oleh pihak pemerintah daerah. Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Oleh karena itu setiap perolehan pendapatan baik PAD maupun dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan sasaran. PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Selain PAD dana daerah juga ditunjang dengan oleh dana perimbangan. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pemenuhan kebutuhan daerah bukan hanya berasal dari dana mandiri hasil pengelolaan sumber daya daerahnya saja melainkan juga dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai pengeluarannya. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat ini akan membantu pemerintah daerah dalam mendanai pemenuhan kebutuhannya. Dana perimbangan ini dialokasikan kepada daerah-

daerah untuk menunjang pendanaan berbagai kebutuhan daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Penggunaan Dana alokasi umum (DAU) diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adanya pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan akan mampu membantu Pemerintah Kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat dalam menciptakan berbagai peluang bisnis baru maupun menciptakan kesempatan kerja untuk penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terciptanya peluang kerja dan kesempatan kerja ini akan mampu memberdayakan penduduk kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri dan menambah jumlah pendapatan masyarakatnya. Selain itu PAD yang dihasilkan dari pengelolaan potensi wilayah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan untuk mengentaskan kemiskinan akan meningkatkan nilai indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak, sehingga indeks pembangunan manusianya juga akan semakin meningkat. Pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan secara maksimal dan tepat dapat membawa dampak yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Permasalahan yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin. Apabila semakin tinggi pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin maka nilai kemiskinan yang ada di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat akan semakin menurun setiap tahunnya.

Namun apabila semakin rendah pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat akan cenderung tetap ataupun bahkan meningkat setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada setiap tahunnya seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi fakta yang terjadi adalah kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih fluktuatif yang artinya kemiskinan terkadang meningkat dan terkadang menurun. Hal tersebut dibuktikan oleh data kemiskinan yang dirilis oleh BPS kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer akan mempengaruhi penurunan kemiskinan melalui belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.2 Pertanyaan Masalah

Didasari latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana perkembangan PAD dan Dana Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2019 ?
2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2019 ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Transfer terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2019 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa perkembangan PAD dan Dana Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2019 ?
2. Menganalisa pengaruh PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2019 ?
3. Menganalisa pengaruh Dana Transfer terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2019 ?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat maupun pemerintah Kalimantan Barat untuk besaran dana yang tepat bagi setiap daerah yang sedang dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai salah satu informasi atau pengetahuan tentang pengaruh kebijakan publik terhadap kemiskinan serta dapat menambah motivasi dalam kebijakan daerah untuk memajukan perekonomian.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan peneliti selanjutnya khususnya tentang kebijakan publik terhadap kemiskinan serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis lain dan pembaca, mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik – topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi Universitas Tanjungpura dan dapat dijadikan tambahan referensi, diharapkan juga hasil penelitian ini mampu memberikan informasi untuk penelitian berikutnya.